

BAGIAN 2

AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)

2.1. Ketentuan Umum

Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Akuntansi PPKD merupakan entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD yang mencatat transaksi-transaksi level Pemda sebagai pelaksanaan dari DPA PPKD. PPKD juga merupakan entitas pelaporan yang bertugas melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Kegiatan akuntansi pada PPKD meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, pembiayaan, investasi, hutang dan transaksi-transaksi selain kas, serta transaksi sebagai konsolidator. Proses tersebut dilaksanakan oleh sebuah fungsi akuntansi berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang sah. Fungsi akuntansi tersebut melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal khusus pendapatan, transaksi belanja pada jurnal khusus belanja serta transaksi lainnya pada jurnal umum.

Secara berkala, transaksi tersebut diposting pada buku besar dan secara periodik disusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri

atas : laporan : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2. Pihak Terkait

1. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam kegiatan ini, Fungsi Akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut:

- Mencatat transaksi-transaksi Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Hutang dan Selain Kas berdasarkan bukti-bukti yang terkait.
- Memposting jurnal-jurnal tersebut ke dalam buku besarnya masing-masing.
- Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Bendahara PPKD

Dalam kegiatan ini, Bendahara PPKD memiliki tugas:

- Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan akuntansi PPKD.

2.3. Akuntansi Anggaran

Langkah 1

Akuntansi anggaran diselenggarakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disahkan oleh PPKD, dengan jurnal sebagai berikut :

Estimasi Pendapatan	xxx
SILPA	xxx
Apropriasi Belanja (SILPA)	xxx xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx
SILPA	xxx
Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan (SILPA)	xxx xxx

Jurnal dilakukan secara detail pada level rincian obyek untuk estimasi pendapatan dan apropriasi belanja.

Langkah 2

Akuntansi PPKD memposting jurnal anggaran yang telah dibuat di jurnal umum ke buku besar tiap kode rekening pendapatan PPKD dan belanja PPKD (rincian obyek). Masing-masing rekening anggaran ini ditempatkan sebagai header dari setiap buku besar yang bersangkutan. Jurnal atas transaksi tersebut akan menjadi angka laporan dalam kolom anggaran di Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Contoh penempatan nilai rekening anggaran dalam buku besar adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUKU BESAR PPKD

KODE REKENING :
NAMA REKENING :
PAGU APBD : Rp. XXXXXXXX
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6

Apabila Akuntansi Anggaran tidak digunakan, angka atau anggaran yang tercantum dalam Buku Besar diambil dari dokumen anggaran.

2.4. Akuntansi Pendapatan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi pendapatan PPKD adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk pendapatan pada level Pemerintah Daerah seperti Dana Perimbangan.

Langkah 1

- a. Akuntansi PPKD menerima laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini yang dilampiri salah satunya oleh tembusan Nota Kredit akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pendapatan.
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Akuntansi PPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan dan sumber-sumber pendapatan PPKD yang lain.

Langkah 2

- a. Berdasarkan dokumen Laporan tersebut, Akuntansi PPKD menjurnal penerimaan yang merupakan pendapatan PPKD dengan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan “Akun pendapatan (sesuai rincian obyek yang terkait)” di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan	xxx

Karena jurnal yang sama dipakai terus dalam mencatat transaksi pendapatan, maka dapat dibuat Buku Jurnal Khusus Pendapatan. Dalam jurnal khusus pendapatan, yang dirinci hanyalah rekening yang bersaldo kredit saja. Sedangkan untuk rekening yang bersaldo debit sudah pasti “Kas di Kas Daerah”.

- b. Dalam kondisi tersebut, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga. Jika pengembalian terjadi untuk

pendapatan yang diterima pada periode berjalan, maka Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun Pendapatan (sesuai rincian obyek yang terkait)” di debet dan “Kas di Kas Daerah” di kredit di jurnal umum.

Pendapatan	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

- c. Terdapat juga kondisi yang memungkinkan terjadinya pengembalian kelebihan pendapatan milik SKPD. Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya. Akuntansi PPKD mencatat transaksi pengembalian kelebihan tersebut pada jurnal umum dengan menjurnal “RK SKPD” di debet.

RK SKPD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Jurnal tersebut berlaku bagi pengembalian pendapatan SKPD yang sifatnya tidak berulang tetapi terjadi dalam periode berjalan.

Langkah 3

Jurnal pendapatan yang telah dibuat kemudian di posting ke Buku Besar.

Langkah 4

Secara periodik, Akuntansi PPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

2.5. Akuntansi Belanja

Seperti telah disebutkan sebelumnya pada bagian ini dimaksud akuntansi Belanja adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk mencatat belanja bunga, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Langkah 1

Akuntansi PPKD menerima tembusan SP2D dari Kuasa BUD.

Langkah 2

- a. Berdasarkan SP2D terkait, Aluntansi PPKD mencatat transaksi ke jurnal sebagai berikut :

Belanja bunga	Belanja bunga	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx
Belanja subsidi	Belanja subsidi	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx
Belanja hibah	Belanja hibah	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx
Belanja bantuan sosial	Belanja bantuan sosial	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx
Belanja bagi hasil	Belanja bagi hasil	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx

Belanja bantuan keuangan	Belanja bantuan keuangan	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx
Belanja tidak terduga	Belanja tidak terduga	xxx
	Kas di Kas Daerah	xxx

Karena jurnal yang sama untuk akan dipakai terus dalam mencatat tiap-tiap transaksi belanja, maka dapat dibuat Buku Jurnal Khusus belanja untuk tiap-tiap belanja. Dalam jurnal khusus belanja, yang dirinci hanyalah rekening yang bersaldo debit saja. Sedangkan untuk rekening yang bersaldo kredit sudah pasti "Kas di Kas Daerah".

- b. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi penerimaan kembali belanja yang tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya (apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan) dan mempengaruhi posisi kas, PPKD melakukan pembetulan dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit, "Pendapatan Lain-lain" di kredit.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan lain-lain	xxx

Sedangkan jika pengembalian tersebut mempengaruhi secara material posisi aset selain kas maka jurnal diatas ditambahkan jurnal "Ekuitas dana (sesuai rincian obyek terkait)" di debit dan "Aset (sesuai rincian obyek terkait)" di kredit di jurnal umum.

Ekuitas dana	xxx
Aset	xxx

- c. Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi penerimaan kembali belanja yang tidak berulang, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, PPKD melakukan pembetulan dengan menjurnal "Kas di Kas Daerah" di debit dan "Pendapatan Lain-lain" di kredit di jurnal umum.

Kas di Kas Daerah	xxx
Pendapatan lain-lain	xxx

Langkah 3

Setiap periode jurnal tersebut akan diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode rekening belanja (rincian obyek).

Langkah 4

Di akhir periode Akuntansi PPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

2.6. Akuntansi Pembiayaan

Seperti telah disebutkan sebelumnya, pada bagian ini yang dimaksud dengan akuntansi Pembiayaan adalah langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam perlakuan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan/pencairan dana cadangan, pemberian/pengembalian pinjaman, dan penerimaan/pembayaran utang.

I. Penerimaan Pembiayaan

Langkah 1

- a. Akuntansi PPKD menerima Laporan Posisi Kas harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pembiayaan pada PPKD (akuntansi penerimaan/pengeluaran kas).
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Akuntansi PPKD harus mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari kegiatan pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dapat berupa pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Akuntansi PPKD menjurnal penerimaan pembiayaan sebagai berikut ke jurnal umum.

Pencairan Dana Cadangan	1	Kas di Kas Daerah	xxx
		Penerimaan Pembiayaan-Dana Cadangan	xxx
	2	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx
		Dana Cadangan	xxx

Penerimaan Pinjaman Daerah	1	Kas di Kas Daerah	xxx
		Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman kpd PD	xxx
	2	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	xxx
		Pinjaman kepada PD	xxx

Penerimaan Utang Daerah	1	Kas di Kas Daerah	xxx
		Penerimaan Pembiayaan-Utang Dalam Negeri	xxx
	2	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	xxx
		Utang Dalam Negeri	xxx

Penerimaan Dana Bergulir	1	Kas di Kas Daerah	xxx
		Penerimaan Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx
	2	Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen	xxx
		Investasi Non Permanen	xxx

Langkah 3

Jurnal-jurnal tersebut kemudian di posting ke Buku Besar.

Langkah 4

Setiap akhir periode, Akuntansi PPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

II. Pengeluaran Pembiayaan

Langkah 1

- a. Akuntansi PPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi pembiayaan pada PPKD (akuntansi penerimaan/pengeluaran kas).
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Akuntansi PPKD harus mengidentifikasi pengeluaran kas yang digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau untuk pemberian pinjaman daerah.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen Laporan Posisi Kas Harian, Akuntansi PPKD menjurnal pengeluaran pembiayaan sebagai berikut di jurnal umum :

Pembentukan Dana Cadangan	1	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Cadangan	xxx
		Kas di Kas Daerah	xxx
	2	Dana Cadangan	xxx
		Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	xxx

Penyertaan Modal Pemda	1	Pengeluaran Pembiayaan-Penyertaan Modal PEMDA	xxx
		Kas di Kas Daerah	xxx
	2	Penyertaan Modal PEMDA	xxx
		Diinvestasikan dlm investasi Jangka Panjang	xxx

Pembayaran Pokok Utang	1	Pengeluaran Pembiayaan-Pembayaran Pokok Utang	xxx
		Kas di Kas Daerah	xxx
	2	Utang Dalam Negeri	xxx
		Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang Jangka Panjang	xxx

Pembentukan Dana Bergulir	1	Pengeluaran Pembiayaan-Dana Bergulir	xxx
		Kas di Kas Daerah	xxx
	2	Investasi Non Permanen	xxx
		Diinvestasikan dalam Investasi Non Permanen	xxx

Langkah 3

Jurnal umum kemudian diposting ke Buku Besar.

Langkah 4

Saldo akhir periode, Akuntansi PPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar ke dalam Neraca Saldo.

2.7. Akuntansi Aset

Prosedur pencatatan aset pada akuntansi PPKD lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, misalnya pengakuan atas investasi jangka panjang atau dana cadangan.

Langkah 1

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, Akuntansi PPKD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- (1) Jenis/nama aset
- (2) Kode rekening terkait
- (3) Nilai aset
- (4) Tanggal transaksi

Langkah 2

Akuntansi PPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Misalnya jurnal pengakuan investasi, sebagai berikut:

Investasi	xxx
Diinvestasikan dalam investasi	xxx

Jurnal pelepasan investasi, sebagai berikut :

Diinvestasikan dalam investasi	xxx
Investasi	xxx

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi investasi jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait.

Langkah 3

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Langkah 4

Setiap akhir periode semua saldo buku besar dipindahkan ke Neraca Saldo.

2.8. Akuntansi Hutang

Prosedur pencatatan hutang pada akuntansi PPKD merupakan pencatatan atas pengakuan atau pelepasan hutang. Beberapa transaksi hutang yang dimaksudkan meliputi hutang jangka pendek terkait kewajiban dengan pihak ketiga (misalnya uang jaminan) dan hutang jangka panjang yang muncul dari transaksi penerimaan atau pengeluaran pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Langkah 1

Berdasarkan bukti transaksi yang ada, Akuntansi PPKD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- (1) Jenis/nama aset
- (2) Kode rekening terkait
- (3) Nilai aset
- (4) Tanggal transaksi

Langkah 2

Akuntansi PPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Jurnal pengakuan hutang, sebagai berikut:

Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang JP	xxx
Hutang Jangka panjang	xxx

Jurnal pembayaran hutang, sebagai berikut:

Hutang Jangka Panjang	xxx
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang JP	xxx

Langkah 3

Secara periodik, buku jurnal atas transaksi hutang jangka panjang tersebut diposting ke dalam buku besar rekening yang terkait.

Langkah 4

Setiap akhir periode semua buku besar dipindahkan ke neraca saldo.

2.9. Akuntansi Konsolidator

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan sebuah arsitektur seperti Akuntansi cabang di Sektor Swasta. Maka, dalam pelaksanaan transaksinya, PPKD diibaratkan sebagai kantor pusat (*home office*) dan SKPD sebagai kantor cabang (*branch office*).

Dengan skema tersebut, terdapat sebuah akun perantara yang berfungsi sebagai jembatan antara PPKD dan SKPD. Akun yang dimaksud adalah RK PPKD dan RK SKPD.

Langkah 1

- a. Akuntansi PPKD menerima Laporan Posisi Kas Harian dari BUD. Laporan ini akan menjadi dokumen sumber untuk penjurnalan akuntansi konsolidator pada PPKD.
- b. Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Akuntansi PPKD harus mengidentifikasi aliran kas dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran SKPD (berdasarkan dokumen sumber SP2D) dan sebaliknya aliran kas dari bendahara penerimaan SKPD ke BUD (berdasarkan dokumen sumber Nota Kredit).

Langkah 2

Akuntansi PPKD kemudian mencatat aliran dana dari Kas Daerah ke kas bendahara pengeluaran SKPD dengan jurnal sebagai berikut:

RK SKPD	xxx
Kas di Kas Daerah	xxx

Sedangkan untuk mencatat aliran dana dari Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah, Akuntansi PPKD mencatat jurnal sebagai berikut:

Kas di Kas Daerah	xxx
RK SKPD	xxx

2.10. Akuntansi selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas pada PPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur akuntansi selain kas pada PPKD meliputi:

- Koreksi kesalahan pencatatan
Merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar.
- Pengakuan hutang dan ekuitas
Merupakan pengakuan terhadap hutang dan ekuitas yang dilakukan oleh PPKD.
- Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*.
Merupakan jurnal yang dilakukan dikarenakan adanya transaksi yang sudah dilakukan PPKD namun pengeluaran atau penerimaan kas belum dilakukan (*accrual*) atau sebaliknya terjadi pengeluaran atau penerimaan kas namun manfaatnya belum diterima atau diberikan oleh PPKD (*prepayment*).

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang dilampiri dengan bukti transaksi jika tersedia.

Langkah 1

Akuntansi PPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian selain kas membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi dan/atau kejadian, kode rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jumlah rupiah.

Langkah 2

Akuntansi PPKD mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum.

- Koreksi kesalan pencatatan

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, akuntansi PPKD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, transaksi belanja bunga dicatat pada belanja subsidi. Untuk melakukan koreksi atas kesalahan tersebut, akuntansi PPKD menjurnal “Belanja Bunga” di debet dan “Belanja Subsidi” di kredit di jurnal umum.

Belanja Bunga	xxx
Belanja Subsidi	xxx

- Pengakuan hutang dan ekuitas

Ekuitas dana pada level PPKD terdiri dari ekuitas dana lancar, ekuitas dana inestvstasi, dan ekuitas dana cadangan.

Ekuitas dana lancar terdiri dari SILPA, cadangan piutang, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. SILPA muncul dari saat akuntansi PPKD melakukan jurnal penutup. Cadangan piutang muncul dari pengakuan piutang pada akhir tahun. Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek muncul pada saat terjadi pengakuan utang jangka pendek pemerintah.

Ekuitas dana investasi PPKD terdiri dari diinvestasi dalam investasi jangka panjang dan diinvestasikan dalam aset lainnya. Nilai ini mencerminkan investasi jangka panjang dan aset lainnya yang dimiliki pemerintah.

Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akuntansi PPKD mengakui dana cadangan dengan menjurnal “Dana cadangan” di debet dan “Diinvestasikan dalam dana cadangan” di kredit di jurnal umum.

Dana cadangan.	xxx
Diinvestasikan dalam dana cadangan	xxx

- Jurnal terkait dengan transaksi yang bersifat *accrual* dan *prepayment*

Pada level PPKD, terdapat dua contoh transaksi *accrual*, yaitu pengakuan utang bunga pada akhir tahun dan piutang dana bagi hasil. Untuk mengakui piutang dana bagi hasil, pada akhir tahun PPKD menjurnal "Piutang dana bagi hasil" di debit dan "Cadangan piutang" di kredit di jurnal umum.

Piutang dana bagi hasil	xxx
Cadangan piutang	xxx

Contoh transaksi *prepayment* pada level PPKD adalah belanja bunga yang dibayarkan untuk periode lebih dari satu tahun. PPKD pada akhir tahun menjurnal "Bunga di bayar dimuka" di debit dan "cadangan bunga di bayar dimuka" di kredit di jurnal umum.

Bunga dibayar dimuka	xxx
Cadangan bunga dibayar dimuka	xxx

Langkah 3

Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting ke dalam buku besar sesuai kode rekening yang bersangkutan.

Langkah 4

Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

2.11. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan keuangan PPKD yang dimaksud adalah laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi PPKD berdasarkan bagian 2.

Langkah 1 (Penyiapan Kertas Kerja)

Akuntansi PPKD menyiapkan kertas kerja (worksheet) 10 lajur sebagai alat untuk menyusun Laporan Keuangan. Kertas kerja adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan Laporan Keuangan. Kertas kerja berguna untuk mempermudah proses pembuatan Laporan Keuangan yang dihasilkan secara manual.

Format dokumen kertas kerja (*worksheet*)

Penggunaan format dalam hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Contoh format kertas kerja di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada disetiap pengembangan berikutnya.

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K

Langkah 2 (Pengisian Neraca Saldo)

Akuntansi PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Angka-angka neraca saldo tersebut diletakan di kolom "Neraca Saldo" yang terdapat pada Kertas Kerja.

Contoh untuk proses ini adalah sebagai berikut :

Langkah 3 (Jurnal Penyesuaian)

Akuntansi PPKD membuat jurnal penyesuaian. Jurnal ini dibuat dengan tujuan melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian tersebut diletakan dalam kolom "Penyesuaian" yang terdapat pada kertas kerja.

Jurnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk :

- Koreksi kesalahan
- Pencatatan jurnal yang belum dilakukan
- Pemindahbukuan
- Pencatatan piutang dan persediaan pada akhir tahun.

Contoh jurnal penyesuaian adalah :

Pengakuan piutang yang belum tertagih	Piutang	xxx
	Cadangan piutang	xxx

Berikut contoh proses diatas.

Pada akhir tahun terdapat informasi DAU yang belum ditransfer sebesar Rp.500 juta. Jurnal penyesuaian yang harus dicatat adalah sebagai berikut :

1.1.3.04.01	Piutang DAU	500.000.000	
3.1.2.01.01	Cadangan Piutang		500.000.000

Langkah 4 (Neraca Saldo setelah penyesuaian)

Akuntansi PPKD melakukan penyesuaian atas neraca saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakan pada kolom "Neraca saldo setelah penyesuaian" yang terdapat pada Kertas Kerja.

ILLUSTRASI KERTAS KERJA PPKD SETELAH PENYESUAIAN

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di kas daerah	18.657.500.000				18.657.500.000	-				
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000		500.000.000	-				
1.2.2.01.01	Penyertaan modal pemda	2.000.000.000				2.000.000.000	-				
1.4.1.01.01	Dana cadangan	500.000.000				500.000.000	-				
1.1.9.01.03	RK dinas kesehatan	1.342.500.000				1.342.500.000	-				
2.2.1.01.01	Utang dalam negeri-Sektor perbankan		2.000.000.000			-	2.000.000.000				
2.2.1.03.01	Utang keapda pemerintah pusat		3.000.000.000			-	3.000.000.000				
3.1.2.01.01	Cadangan piutang				500.000.000	-	500.000.000				
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		2.000.000.000			-	2.000.000.000				
3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	5.000.000.000				5.000.000.000	-				
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam dana cadangan		500.000.000			-	500.000.000				
3.1.1.01.01	SiLPA		10.000.000.000			-	10.000.000.000				
4.2.2.01.01	Pendapatan DAU		5.000.000.000			-	5.000.000.000				
4.2.3.01.02	Pendapatan DAK		3.000.000.000			-	3.000.000.000				
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah	200.000.000				200.000.000	-				
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga	200.000.000				200.000.000	-				
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa	100.000.000				100.000.000	-				
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah		3.000.000.000			-	3.000.000.000				
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank		2.000.000.000			-	2.000.000.000				
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan	500.000.000				500.000.000	-				
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD	2.000.000.000				2.000.000.000	-				
		30.500.000.000	30.500.000.000	500.000.000	500.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000	-	-	-	-

Langkah 5 (identifikasi akun-akun LRA)

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen Laporan Realisasi Anggaran (kode akun 4, 5 dan 6) dan memindahkannya ke kolom “Laporan Realisasi Anggaran” yang terdapat pada Kertas kerja.

Nilai kolom debet dan kredit pada kolom “Laporan Realisasi Anggaran” dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom (tidak balance). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun berjalan” Nilai ini ditempatkan dibawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan didapatkan nilai yang seimbang antara kolom debet dan kredit.

Langkah 6 (Identifikasi akun-akun Neraca)

Berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan, Akuntansi PPKD mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen (kode akun 1, 2 dan 3) dan memindahkannya ke kolom “neraca” yang terdapat pada Kertas Kerja.

Nilai kolom debet dan kredit pada kolom “Neraca” dijumlahkan. Akan didapat jumlah yang berbeda antara kedua kolom (tidak balance). Selisih antara kedua nilai ini merupakan nilai “SILPA tahun berjalan” Nilai “SILPA tahun berjalan” yang dihasilkan dalam kolom “neraca” harus sama dengan nilai “SILPA tahun berjalan” yang dihasilkan oleh kolom “Laporan Realisasi Anggaran” Nilai ini ditempatkan dibawah kolom yang nilainya lebih kecil, sehingga akan didapatkan nilai yang seimbang antara kolom debet dan kredit.

Dari kertas kerja yang telah selesai diisi, Akuntansi PPKD dapat menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca PPKD dan Laporan Realisasi Anggaran PPKD.

ILLUSTRASI KERTAS KERJA PPKD SETELAH IDENTIFIKASI AKUN LRA DAN NERACA

Kode Rekening	Uraian	Neraca Saldo		Penyesuaian		Neraca Saldo setelah Penyesuaian		Laporan Realisasi Anggaran		Neraca	
		D	K	D	K	D	K	D	K	D	K
1.1.1.01.01	Kas di kas daerah	18.657.500.000				18.657.500.000				18.657.500.000	
1.1.3.04.01	Piutang DAU			500.000.000		500.000.000				500.000.000	
1.2.2.01.01	Penyertaan modal pemda	2.000.000.000				2.000.000.000				2.000.000.000	
1.4.1.01.01	Dana cadangan	500.000.000				500.000.000				500.000.000	
1.1.9.01.03	RK dinas kesehatan	1.342.500.000				1.342.500.000				1.342.500.000	
2.2.1.01.01	Utang dalam negeri-Sektor perbankan		2.000.000.000				2.000.000.000				2.000.000.000
2.2.1.03.01	Utang keapda pemerintah pusat		3.000.000.000				3.000.000.000				3.000.000.000
3.1.2.01.01	Cadangan piutang				500.000.000		500.000.000				500.000.000
3.2.1.01.01	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang		2.000.000.000				2.000.000.000				2.000.000.000
3.2.4.01.01	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	5.000.000.000				5.000.000.000				5.000.000.000	
3.3.1.01.01	Diinvestasikan dalam dana cadangan		500.000.000				500.000.000				500.000.000
3.1.1.01.01	SiLPA		10.000.000.000				10.000.000.000				10.000.000.000
4.2.2.01.01	Pendapatan DAU		5.000.000.000				5.000.000.000		5.000.000.000		
4.2.3.01.02	Pendapatan DAK		3.000.000.000				3.000.000.000		3.000.000.000		
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah	200.000.000				200.000.000		200.000.000			
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga	200.000.000				200.000.000		200.000.000			
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa	100.000.000				100.000.000		100.000.000			
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah		3.000.000.000				3.000.000.000			3.000.000.000	
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank		2.000.000.000				2.000.000.000			2.000.000.000	
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan	500.000.000				500.000.000		500.000.000			
6.2.2.02.01	Penyertaan modal pemda-BUMD	2.000.000.000				2.000.000.000		2.000.000.000			
		30.500.000.000	30.500.000.000	500.000.000	500.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000		13.000.000.000	28.000.000.000	18.000.000.000
								SiLPA tahun berjalan	10.000.000.000		10.000.000.000
									13.000.000.000	13.000.000.000	28.000.000.000

Langkah 7 (Jurnal penutup)

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi nol pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran, yaitu Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pendapatan	xxx
Penerimaan Pembiayaan	xxx
Apropriasi Belanja	xxx
Estimasi Pengeluaran Pembiayaan	xxx
SILPA tahun berjalan	xxx
Belanja	xxx
Pengeluaran Pembiayaan	xxx
Estimasi Pendapatan	xxx
Estimasi Penerimaan Pembiayaan	xxx
SILPA tahun berjalan	xxx

Surplus/defisit kemudian ditutup pada SILPA (Ekuitas Dana di Neraca) dengan jurnal sebagai berikut :

SILPA (Ekuitas Dana)	xxx
SILPA tahun berjalan	xxx

Atau

SILPA tahun berjalan	xxx
SILPA (Ekuitas Dana)	xxx

Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai SILPA di neraca menjadi jumlah yang benar. Contoh jurnal penutup untuk neraca saldo di atas adalah sebagai berikut :

4.1.1.01.01	Pendapatan DAU	5.000.000.000	
4.1.1.01.02	Pendapatan DAK	3.000.000.000	
	SILPA tahun berjalan		8.000.000.000
3.1.1.01.01	SILPA tahun berjalan	500.000.000	
5.1.2.01.01	Belanja Bunga		200.000.000
5.1.4.01.01	Belanja Subsidi		200.000.000
	Belanja Hibah		100.000.000
6.1.4.01.01	Penerimaan Pinjaman Daerah	3.000.000.000	
6.1.4.03.01	Penerimaan Pinjaman Bank	2.000.000.000	
	SILPA tahun berjalan		5.000.000.000
	SILPA tahun berjalan	2.500.000.000	
6.2.1.01.01	Pembentukan Dana Cadangan		500.000.000
6.2.2.02.01	Penyertaan Modal Pemda		2.000.000.000
	SILPA tahun berjalan	10.000.000.000	
3.1.1.01.01	SILPA		10.000.000.000

Langkah 8 (LRA dan Neraca)

Setelah jurnal penutup selesai dibuat, selanjutnya akuntansi PPKD menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Contoh LRA dan Neraca untuk Neraca Saldo setelah penutupan dari ilustrasi di atas adalah sebagai berikut :

Ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
	PENDAPATAN		
4.2.2.01.01	Pendapatan DAU	5.500.000.000	5.000.000.000
4.2.3.01.02	Pendapatan DAK	3.500.000.000	3.000.000.000
	BELANJA		
5.1.2.01.01	Belanja-Bunga utang jangka pendek kepada pemerintah	250.000.000	200.000.000
5.1.3.01.02	Belanja-Subsidi kepada lembaga	250.000.000	200.000.000
5.1.4.03.01	Belanja-Hibah kepada pemerintah desa	150.000.000	100.000.000
	SURPLUS (DEFISIT)	8.350.000.000	7.500.000.000
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.4.01.01	Penerusan pinjaman daerah dari pemerintah	3.000.000.000	3.000.000.000
6.1.4.03.01	Penerimaan pinjaman dari bank	2.000.000.000	2.000.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan		
6.2.1.01.01	Pembentukan dana cadangan	500.000.000	500.000.000
6.2.2.02.01	Penyertaan modal Pemda-BUMD	2.000.000.000	2.000.000.000
	SILPA	10.850.000.000	10.000.000.000

Ilustrasi Neraca PPKD

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA PPKD
PER 31 DESEMBER TAHUN N DAN TAHUN N-1

URAIAN	JUMLAH
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di kas daerah	18.657.500.000
Piutang DAU	500.000.000
ASET UNTUK DIKONSOLIDASI	
RK Dinas Kesehatan	1.342.500.000
INVESTASI JANGKA PANJANG	
Investasi Permanen	
Penyertaan modal Pemda	2.000.000.000
DANA CADANGAN	
Dana cadangan	500.000.000
JUMLAH ASET	23.000.000.000
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang dalam negeri-sektor perbankan	2.000.000.000
Utang kepada pemerintah pusat	3.000.000.000
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
SILPA	20.000.000.000
Cadangan piutang	500.000.000
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang	2.000.000.000
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang	(5.000.000.000)
EKUITAS DANA CADANGAN	
Diinvestasikan dalam dana cadangan	500.000.000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	23.000.000.000

Nilai SILPA yang terdapat dalam ekuitas dana lancar merupakan nilai surplus (defisit) yang dihasilkan oleh LRA ditambah dengan nilai SILPA awal tahun. Secara teknis, nilai SILPA dalam neraca dihasilkan oleh jurnal penutup, yaitu penutupan saldo "SILPA tahun berjalan" pada saldo "SILPA".

Langkah 9 (Konversi SAP)

Laporan keuangan, yang dibuat oleh PPKD yang dihasilkan oleh system ini menggunakan format/klasifikasi akun belanja dan pendapatan Permendagri 13 Tahun 2006 yang berbeda dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk ini diperlukan sebuah langkah konversi. Berikut bagan konversi yang dimaksud.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
B. Dana Perimbangan		B. Pendapatan Transfer
1. Dana Bagi Hasil		Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- Dana Bagi Hasil Pajak	→	1. Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	→	2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum	→	3. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus	→	4. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya
1. Pendapatan Hibah	→	1. Dana Otonomi Khusus
2. Dana darurat	→	2. Dana Penyesuaian
3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	→	Transfer Pemerintah Provinsi
4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	→	1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
5. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	→	2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya
		C. Lain-lain Pendapatan Yang Sah
		1. Pendapatan Hibah
		2. Pendapatan Dana Darurat
		3. Pendapatan Lainnya

Jenis Pendapatan Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (bagi hasil pajak dan bukan pajak), Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dikonversi ke dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan, sedangkan jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk obyek Pendapatan Hibah, Dana Darurat dan Bantuan Keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dikonversi ke dalam pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Untuk

obyek pendapatan Dana bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dikonversi ke dalam pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi. Dan obyek pendapatan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dikonversi ke dalam pendapatan transfer Pemerintah Pusat lainnya.

Permendagri No.13 Tahun 2006 BELANJA		PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung		A. Belanja Operasi
2. Belanja Bunga	→	3. Bunga
3. Belanja Subsidi	→	4. Subsidi
4. Belanja Hibah	→	5. Hibah
5. Belanja Bantuan Sosial	→	6. Bantuan Sosial
6. Belanja Bagi Hasil	→	B. Belanja Tak Terduga
7. Belanja Bantuan Keuangan	→	1. Belanja Tak Terduga
8. Belanja Tidak Terduga	→	C. Transfer/Bagi Hasil ke Desa
		1. Bagi Hasil Pajak
		2. Bagi Hasil Retribusi
		3. Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Belanja bunga dalam kelompok belanja tidak langsung di konversi ke dalam belanja bunga dalam kelompok belanja operasi. Belanja subsidi dalam kelompok belanja tidak langsung dikonversi ke dalam belanja subsidi dalam kelompok belanja operasi. Belanja hibah dalam kelompok belanja tidak langsung dikonversi ke dalam belanja hibah dalam kelompok belanja operasi. Belanja bantuan sosial dalam kelompok belanja tidak langsung dikonversi ke dalam belanja bantuan sosial dalam kelompok belanja operasi. Belanja bantuan bagi hasil dalam kelompok belanja tidak langsung dikonversi ke dalam Belanja Transfer. Belanja Bantuan Keuangan dalam kelompok belanja tidak langsung dikonversi ke dalam Belanja bantuan keuangan dalam kelompok belanja operasi. Belanja tidak terduga dalam kelompok belanja tidak langsung dikonversi ke dalam belanja tidak terduga.

Berikut adalah contoh dari Laporan Keuangan yang dihasilkan Akuntansi PPKD. Daftar akun yang terdapat dalam contoh laporan ini hanya merupakan ilustrasi saja.

Susunan daftar akun disesuaikan dengan struktur kode rekening di setiap Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER
 (dalam rupiah)

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
PENDAPATAN			
PENDAPATAN TRANSFER			
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan			
Dana Bagi Hasil Pajak			
Dana Bagi Hasil Bukan (Sumber Daya Alam)			
Dana Alokasi Umum			
Dana Alokasi Khusus			
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Penyesuaian			
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
Pendapatan Hibah			
Pendapatan Dana Darurat			
Pendapatan lainnya			
Jumlah			
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Barang			
Belanja Bunga			
Belanja Subsidi			
Belanja Hibah			
Belanja Bantuan Sosial			
Belanja Bantuan Keuangan			
BELANJA TIDAK TERDUGA			
Belanja Tidak Terduga			
Jumlah			
TRANSFER			
Surplus / (Defisit)			

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih/ (Kurang)
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN DAERAH			
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)			
Pencairan Dana Cadangan			
Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
Penerimaan pinjaman daerah			
Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
Penerimaan piutang daerah			
Jumlah			
PENGELUARAN DAERAH			
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
Pembayaran Pokok Utang			
Pemberian pinjaman daerah			
Jumlah			
Sisa lebih Pembayaran Anggaran (SILPA)			

Palangka Raya, 20xx
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Tanda tangan

(Nama lengkap)
NIP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA PPKD
 Per 31 Desember Tahun n dan Tahun n-1

Uraian	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun n	Tahun n-1	Jumlah	%
ASET				
ASET LANCAR				
Kas				
Kas di Kas Daerah				
Jumlah				
ASET UNTUK DIKONSOLIDASI				
RK SKPD				
RK SKPD				
Jumlah				
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Permanen				
Investasi Non Permanen				
Jumlah				
ASET LAINNYA				
Tagihan penjualan angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan pihak ketiga				
Aset Tak Berwujud				
Aset lain-lain				
Jumlah				
JUMLAH ASET				
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
Uang Muka dari Kas Daerah				
Pendapatan Diterima Dimuka/Utang Jangka Pendek Lainnya				
Jumlah				
EKUITAS DANA				
EKUITAS DANA LANCAR				
SILPA				
Cadangan Piutang				
Cadangan Persediaan				
Jumlah				
EKUITAS DANA INVESTASI				
Diinvestasikan dalam Aset Tetap				
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya				
Jumlah				
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				

Palangka Raya, 20xx
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
 Tanda tangan
 (Nama lengkap)
 NIP

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD

PENDAHULUAN		
Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD	
	2.1	Ekonomi makro
	2.2	Kebijakan keuangan
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD	
	3.1	Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan PPKD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah PPKD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD	
	5.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan PPKD
		5.1.1. Pendapatan
		5.1.2. Belanja
		5.1.3. Aset
		5.1.4. Kewajiban
		5.1.5. Ekuitas Dana
	5.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada PPKD
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan PPKD	
Bab VII	Penutup	

Palangka Raya, 20xx
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tanda tangan
Nama lengkap)
NIP

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca dan (c) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20xx sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 20xx

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tanda tangan
Nama lengkap)
NIP

2.12.ILUSTRASI TRANSAKSI PPKD

Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi pada level PPKD.

- 4 Januari 2009 Menerbitkan SP2D atas pembayaran gaji bulan Januari untuk Dinas Kesehatan dengan rincian :
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| Gaji Pokok | Rp. 999.510.000,- |
| Tunjangan Keluarga | Rp. 87.457.125,- |
| Tunjangan Fungsional | Rp. 99.951.000,- |
| Tunjangan Fungsional Umum | Rp. 62.469.375,- |
- Dengan luran Wajib Pegawai sebesar Rp.52.240.000,- dan Tabungan Perumahan Pegawai sebesar Rp.22.575.000,-
- 5 Januari 2009 Diterbitkan SP2D UP kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp.30 juta
- 11 Januari 2009 Menerima setoran dari Dinas Kesehatan retribusi kesehatan senilai Rp.5 juta.
- 20 Januari 2009 Menerbitkan SP2D GU kepada Dinas Kesehatan senilai Rp.35 juta.
- 27 Januari 2009 Menerbitkan SP2D LS kepada Dinas Kesehatan sebesar Rp.75 juta untuk pembelian bahan kimia untuk kegiatan Fogging dari pembayaran ini, dipungut PPN senilai Rp.6.818.182,-
- 28 Januari 2009 Melakukan pembayaran atas kelebihan uang pendaftaran mahasiswa/(i) Akademi Keperawatan untuk tahun 2009, pembayaran tersebut senilai Rp.50 juta.
- 20 Feb 2009 PPKD melakukan transfer dan untuk pembentukan dana cadangan sebesar Rp.500 juta.
- 1 Maret 2009 PPKD menerima dana pinjaman dari pemerintah pusat senilai Rp.1 milyar untuk menutup deficit APBD.
- 1 Maret 2009 PPKD menempatkan dana sebesar Rp.20 milyar di SBI.
- 3 Maret 2009 PPKD melakukan pembayaran subsidi kepada perusahaan lokal setempat sebesar Rp.250 juta.
- 5 Maret 2009 PPKD menerima Dana Alokasi Umum sebesar Rp.2 milyar

- 20 Maret 2009 Dilakukan belanja untuk Bantuan Sosial bagi kesejahteraan guru SD sebesar Rp.200 juta.
- 30 Maret 2009 PPKD melakukan pembayaran dana pinjaman dari BUMD senilai Rp. 1 milyar yang dilakukan di tahun 2007.
- 5 April 2009 Diberikan bantuan keuangan sebesar Rp.100 juta kepada pemerintah desa untuk pembangunan jalan desa.
- 10 April 2009 Dilakukan transfer dana sebesar Rp.400 juta sebagai dana bantuan untuk Partai Politik.
- 10 April 2009 PPKD menerima Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.20 milyar.
- 15 April 2009 Diterima Pendapatan Bagi Hasil dari PBB sebesar Rp.1 milyar dan BPHTB sebesar Rp.200 juta.
- 5 Mei 2009 Dilakukan pengembalian Pendapatan Bagi Hasil dari PBB untuk tahun 2008 sebesar Rp.15 juta.
- 15 Mei 2009 Dilakukan pencairan dana atas deposito yang dimiliki oleh Pemda di Bank Daerah senilai Rp.2 milyar. Pada saat pencairan, diterima bunga deposito senilai Rp.20 juta.
- 7 Juni 2009 Diterima Pendapatan Bagi Hasil dari PPh.21 sebesar Rp. 300 juta
- 10 Juni 2009 Dilakukan transfer dana sebesar Rp.2 milyar sebagai tambahan penyertaan modal Pemda di PDAM.
- 23 Juni 2009 PPKD melakukan pembelian Obligasi BUMN senilai Rp.1 milyar.
- 30 Juni 2009 Diterima dana pinjaman dari Lembaga Perbankan senilai Rp.5 milyar. Hutang ini jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ke depan.

Dari transaksi-transaksi ini, akuntansi PPKD akan mencatat jurnal sebagai berikut :

4 Jan	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan	1.249.387.500	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		1.249.387.500
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	74.815.000	
	2.1.1.01.01	Hutang PFK – IWP		52.240.000
	2.1.1.05.01	Hutang PFK – Taperum		22.575.000
5 Jan	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan	30.000.000	
	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah		30.000.000
11 Jan	1.1.1.01.01	Kas di Kas Daerah	5.000.000	
	1.1.9.01.03	RK Dinas Kesehatan		5.000.000

20 Jan	1.1.9.01.03 1.1.1.01.01	RK Dinas Kesehatan Kas di Kas Daerah	35.000.000	35.000.000
27 Jan	1.1.9.01.03 1.1.1.01.01	RK Dinas Kesehatan Kas di Kas Daerah	75.000.000	75.000.000
	1.1.1.01.01 2.1.3.03.01	Kas di Kas Daerah Utang PPN	6.818.182	6.818.182
28 Jan	1.1.9.01.03 1.1.1.01.01	RK Dinas Kesehatan Kas di Kas Daerah	50.000.000	50.000.000
20 Feb	6.2.1.01.01 1.1.1.01.01	Pembentukan Dana cadangan Kas di Kas Daerah	500.000.000	500.000.000
	1.4.1.01.01 3.3.1.01.01	Dana cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan	500.000.000	500.000.000
15 Mei	3.2.1.01.01 1.2.1.04.02	Diinvestasikan dalam investasi jangka panjang Investasi dalam deposito jangka panjang	2.000.000.000	2.000.000.000
	1.1.1.01.01 4.1.4.03.01	<i>Merupakan jurnal kololari atas pencairan deposito. Penerimaan kas melalui kas daerah dicatat dengan menjurnal " Kas di Kas Daerah " di debit dan "Pencairan deposito" di kredit'</i> Kas di Kas Daerah	20.000.000	20.000.000
7 Juni	1.1.1.01.01 4.2.1.01.03	Pendapatan bunga deposito Kas di Kas Daerah	300.000.000	300.000.000
10 Juni	6.2.2.02.01 1.1.1.01.01	Bagi hasil PPh.21 Penyertaan modal Pemda di BUMD Kas di Kas Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000
	1.2.2.01.01 3.2.1.01.01	Penyertaan Modal Pemda Diinvestasikan dlm investasi jangka panjang	2.000.000.000	2.000.000.000
23 Juni	1.1.2.02.01 3.2.1.01.01	Investasi dalam obligasi Diinvestasikan dlm investasi jangka panjang	1.000.000.000	1.000.000.000
	1.1.1.01.01 6.1.4.03.01	<i>Merupakan jurnal kololari atas pembelian obligasi. Pengeluaran kas melalui kas daerah dicatat dengan menjurnal "Belanja pembiayaan obligasi" di debit dan "Kas di Kas Daerah" di kredit'</i> Kas di Kas Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000
30 Juni	3.2.4.01.01 2.2.1.01.01	Pinjaman Pemda kpd Lembaga Perbankan Dana yg harus fisediakan utk utang jangka panjang Utang dalam Negeri sektor perbankan	5.000.000.000	5.000.000.000

2.13.FORMAT BUKU YANG DIGUNAKAN

Penggunaan format-format dibawah ini disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang. Contoh-contoh format di bawah ini menunjukkan informasi minimal yang harus ada dalam disetiap pengembangan berikutnya.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BUKU BESAR
PPKD

KODE REKENING :
NAMA REKENING :
PAGU APBD :
PAGU PERUBAHAN APBD :

Tanggal	Uraian	Ref	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
	Jumlah				

Palangka Raya, 20xx

AKUNTANSI PPKD
(Tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

